



**PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI**

LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI**

Jalan Jend. A. Thalib No. 45
Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62695
Fax (0741) 62751

2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKj Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 30 Maret 2023
Kepala Dinas,

MARIEF MUNANDAR, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670307 199903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar** dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial mencapai 100 % dan indikator Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM mencapai 100 %.
2. **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima** dengan indikator Nilai IKM dan Nilai SAKIP senilai 86 untuk nilai IKM dan nilai SAKIP mendapatkan CC, indikator Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk mencapai 100 %, indikator Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil mencapai 100 %, indikator Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan mencapai 100 %, indikator Persentase Pengeluaran Profil kependudukan mencapai 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangannya perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi kedepan, sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial
3. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu-isu Strategis.....	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
1.6. Keuangan.....	10
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan	16
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
2.3. Anggaran Tahun 2022.....	20
2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi..	21
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	22
2.4. Instrumen Pendukung	23
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	32
ANALISIS EFISIENSI	35
BAB 4 PENUTUP	36

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

DAFTAR TABEL



Tabel 1. 1. Jumlah Pns Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi (Menurut Kepangkatan).....	7
Tabel 1. 2. Jumlah Pns Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi (Menurut Jenjang Pendidikan)	8
Tabel 1. 3 Daftar Sarana dan Prasarana.....	9
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.....	13
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan	17
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kependudukan dan.....	19
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 2. 5 Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022.....	21
Tabel 2. 6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.....	22
Tabel 2.3. 1 Pagu Anggaran Dinas Sosialdukcakil Provinsi Jambi Tahun 2022.....	20
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Sosialdukcakil Provinsi Jambi Tahun 2022	25
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022	30
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran	32
Tabel 3. 6 Analisis efisiensi Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022.....	34

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	2
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah ASN Tahun 2022.....	7
Gambar 1. 3 Grafik ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022	8
Gambar 1. 4 Diagram ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022.....	9
Gambar 2. 1 Anggaran Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Gambar 2. 2 <i>Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi</i>	23

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB I berisi :

Struktur Organisasi
Fungsi dan Tugas
Isu-Isu Strategis
Keadaan Pegawai
Keadaan Sarana
dan Prasarana
Keuangan
Sistematika

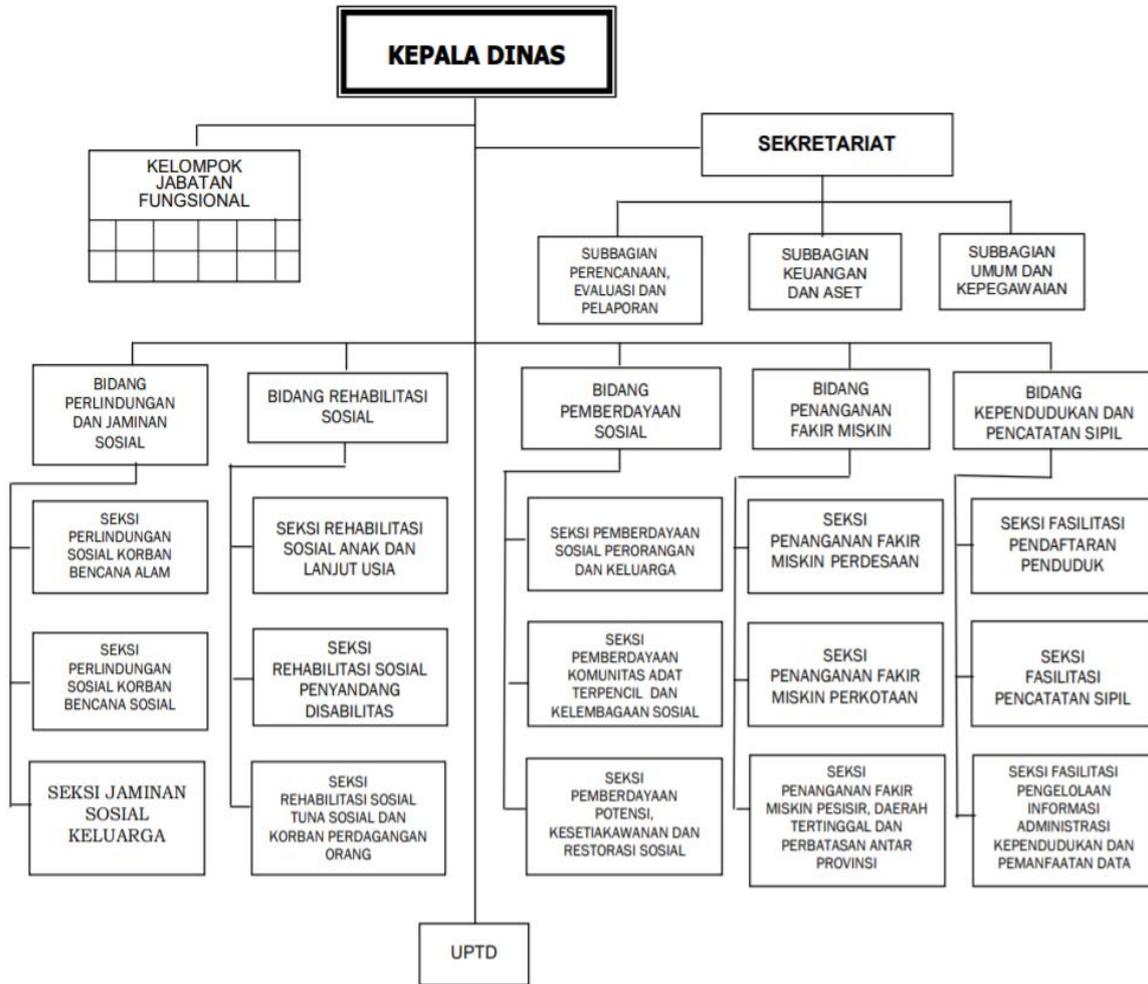
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi**



Pelaksanaan anggaran dan upaya pencapaian target, tujuan dan sasaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
5. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten/kota;
6. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah Kinerja, dan yang kedua adalah Manajemen Kinerja.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah dinamika Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan

stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan, antara lain, dimaksudkan agar perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memberikan pelayanan kedalam secara internal, yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum antara lain melalui pelayanan UPT Panti. Untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan tenaga non PNS dari berbagai disiplin ilmu.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, beberapa permasalahan yang menghambat kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

- a. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan fungsi Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih perlu ditingkatkan, seperti Lulusan STKS yang terbatas di UPT Panti, Minimnya bintek dan diklat yang diikuti pejabat Fungsional. Demikian pula belum adanya tenaga Administrator Database (ADB) di Provinsi untuk urusan dukcapil.
- b. Prasarana UPT Panti milik pemerintah provinsi yang umumnya dibangun pada tahun 1980 an, sangat perlu untuk direhab secara bertahap. Seperti Atap di Panti Sosial; Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur yang 70 persen masih asbes.
- c. Sarana yang masih minim dan perlu ditingkatkan. Seperti Televisi, Komputer, Sound System yang memadai dan sebagainya.
- d. Update dan Validasi data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial) harus terus ditingkatkan. Dimana komitmen, penganggaran kabupaten/kota dalam Update dan Validasi data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih bervariasi. Ada yang tiap tahun menganggarkan, ada pula yang belum menganggarkan.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Gambaran pelayanan perangkat daerah

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi antara lain:

1. menyediakan prasarana dan sarana Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

1. perumusan kebijakan anggaran dan regulasi;
2. SDM Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. standar mutu layanan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PSKS yang aktif

Kedua Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.4 Keadaan Pegawai

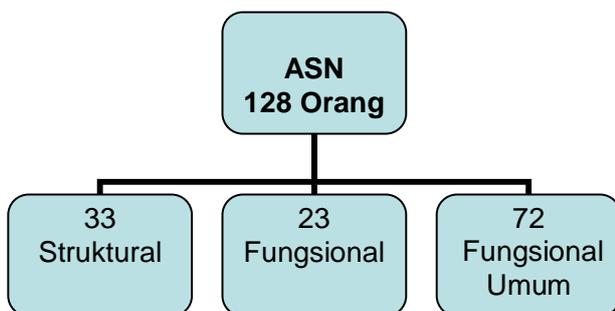
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Tugas Pembantuan Yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi didukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi) dan UPTD (UPT Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi

Luhur dan UPTD Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik (PSBAWEP) Harapan Mulya.

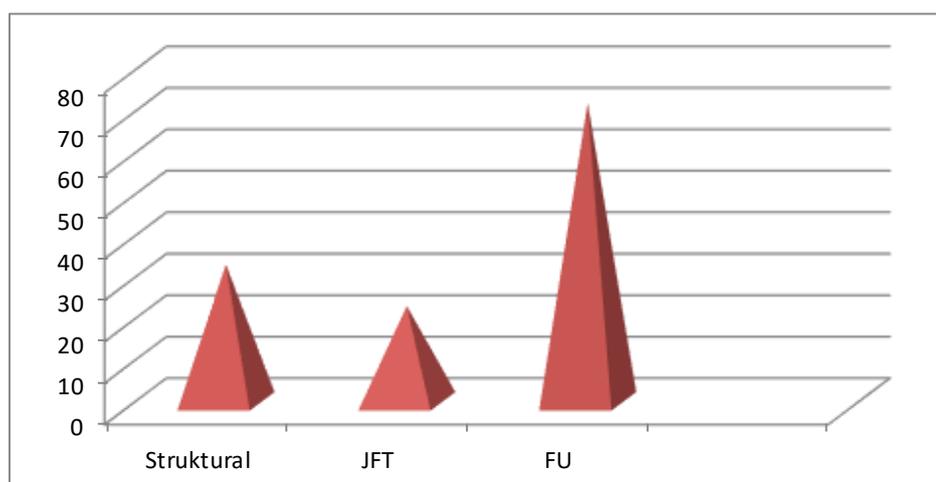
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi pegawai di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 128 pegawai yang terdiri 33 pejabat struktural, 23 pejabat fungsional tertentu, dan 72 pejabat fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **128 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :



Gambar 1. 2 Grafik Jumlah ASN Tahun 2022

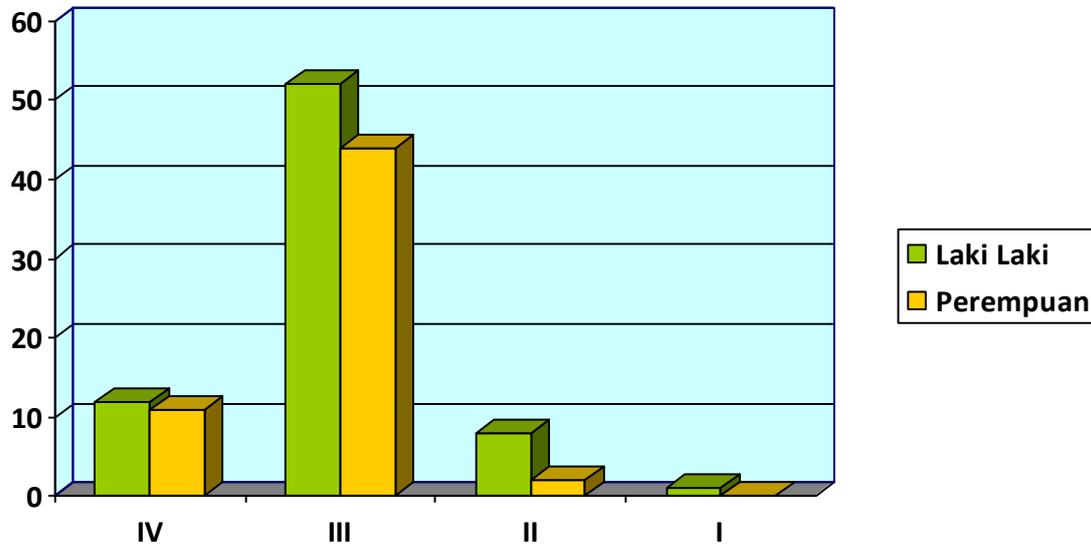


Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa Di Dinas SosialDukcapil Provinsi Jambi terdapat pegawai yang dominan adalah Fungsional Umum dibandingkan Jabatan Fungsional Tertentu dan diharapkan dapat memberikan kinerja secara maksimal.

TABEL 1. 1.
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)

Golongan	Pangkat	Ruang	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
IV	Pembina Utama	IV /e	0	0	Orang
	Pembina Utama Madya	IV /d	1	1	Orang
	Pembina Utama Muda	IV /c	1	1	Orang
	Pembina Tk. I	IV /b	8	3	5 Orang
	Pembina	IV /a	13	7	6 Orang
III	Penata Tk. I	III /d	44	26	18 Orang
	Penata	III /c	15	6	9 Orang
	Penata Muda Tk. I	III /b	29	16	13 Orang
	Penata Muda	III /a	8	4	4 Orang
II	Pengatur Tk. I	II /d	3	2	1 Orang
	Pengatur	II /c	1	1	0 Orang
	Pengatur Muda Tk. I	II /b	2	1	1 Orang
	Pengatur Muda	II /a	2	2	0 Orang
I	Juru Tk. I	I /d	2	1	0 Orang
	Juru	I /c	1	1	0 Orang
	Juru Muda Tk. I	I /b	0	0	0 Orang
	Juru Muda	I /a	0	0	0 Orang
Jumlah			128	71	57 Orang

Gambar 1. 3 Grafik ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Dinas SosialDukcapil Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

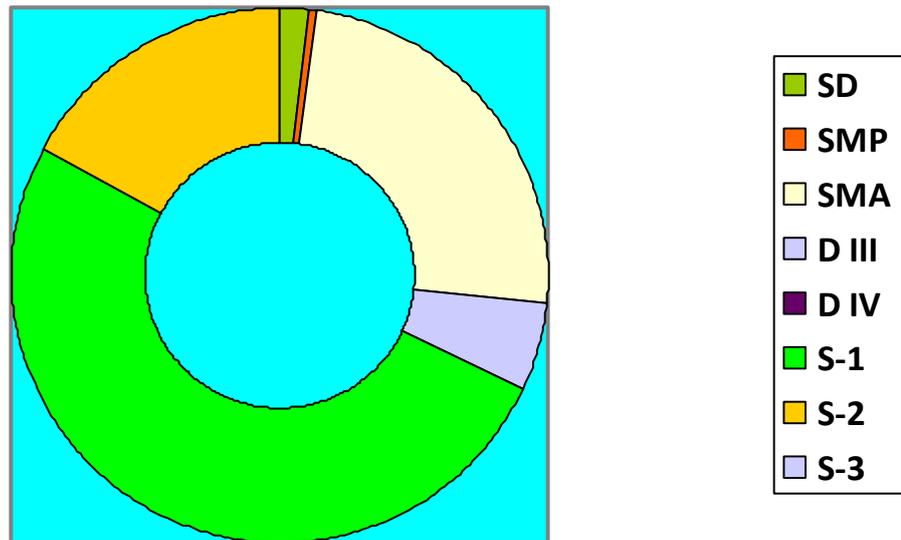
Tabel 1. 2.

**JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)**

Tingkat Pendidikan	Banyaknya
Sekolah Dasar	2 orang
Sekolah Menengah Pertama	1 orang
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	31 orang
Diploma 1	0 orang
Diploma 2	0 orang
Diploma 3	7 orang
Diploma 4	0 orang
S-1	65 orang
S-2	22 orang
S-3	0 orang
Jumlah	128 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2022

Gambar 1. 4 Diagram ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi sebagian besar berada pada jenjang pendidikan S1.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sejauh ini di rasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisibaik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
A.	I. BANGUNAN DAN GEDUNG DINAS	
	1. Gedung Kantor Dinas Sodikapil Provinsi Jambi	8 Unit
	2. Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit
	3. Pos Jaga	1 Unit
	4. Gudang	2 Unit
	5. Mushola	1 Unit
	6. Parkir	3 Unit
	II. PSBAWEP	
	1. Gedung Kantor	9 Unit

	2. Mushola 3. Aula 4. Wisma 5. Rumah Dinas 6. Asrama	2 Unit 2 Unit 11 Unit 4 Unit 5 Unit
	III. PSTW	
	1. Gedung Kantor 2. Mushola 3. Aula 4. Wisma 5. Rumah Dinas 6. Garasi 7. Gedung Klinik 8. Dapur	1 Unit 1 Unit 1 Unit 14 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
B.	PERALATAN DAN MESIN	
	1. Alat Angkutan Kendaraan Roda 4 2. Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 3. Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur 4. Alat Kantor dan Rumah Tangga 5. Alat Studio dan Komunikasi 6. Alat-alat Kedokteran 7. Alat-alat Laboratorium 8. Alat-alat Keamanan 9. Alat Olahraga	14 Unit 12 Unit 13 Unit 2389 Unit 33 Unit 37 Unit 37 Unit 1 Unit 2 Unit

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 42.783.072.921,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.611.389.695,- dan belanja langsung sebesar Rp.26.171.683.695,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 26.171.683.695,- Yang didukung oleh 11 program dan 25 kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

□ RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif, memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

□ BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistemati kapenulisan LKjIP.

□ BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

□ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

□ BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1. Perencanaan Strategis

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Anggaran Tahun 2022
4. Instrumen Pendukung

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi

perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umumserta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2021, Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 di tetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2021 – 2026. Dinas Sosial Provinsi Jambi mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Jambi maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah

dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Adapun Visi Gubernur Jambi tahun 2019-2024 adalah “**Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT**”, dengan Misi yaitu:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “ Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Sosial Dukupil dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

				memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber: RPJM Provinsi Jambi 2021-2026

Sebagai implementasi Visi dan Misi Gubernur Jambi tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah Rentsra Dinsos Dukcapil Jambi 2021-2026 dalam bentuk sasaran strategi Dinas Sosial Dukcapil. Sebagai OPD teknis Dinas sosial dukcapil Provinsi Jambi juga merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur tersebut.

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dukcapil Provinsi Jambi dan Indikatornya, yaitu:

Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, dengan indicator: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial.

Secara lengkap terlihat dari, tabel berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,50 %	0,50 %	1%	1%	1%	1%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.	31,73%	100%	100%	100%	100%	100%
2	memantapkan Tata kelola Pemerintah.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dnegan pelayanan	Nilai IKM	83,09%	83,50 %	84,00 %	84,50 %	85,30 %	83,09 %
			Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A

		n publik yang prima.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil.		94%	95%	96%	97%	98%
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.		99 persen				
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan.		80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase Pengeluaran Profil Kependudukan.		100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah:

A. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi Dan Indikatornya

- 1 Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan Indikator : % PMKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya.
- 2 Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan Indikator : % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Sasaran Strategi Jangka Menengah

Adapun Sasaran Strategis yang Dinas Sosial Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatnya perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Indikator

- 1 Indikator Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah :
 - Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosialnya.
- 2 Indikator sasaran Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Indikator Meningkatnya perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah
 - Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR CAPAIAN	Baseline 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,5%	0,50%	1%	1%	1%	1%	1%
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	25%	25%	40%	40%	40%	40%	40%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	31,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemerlu	2,50%	2,50%	3%	3%	3%	3%	3%

			Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial							
			Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5%	5%	8%	8%	8%	9%	9%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM	Nilai IKM	83,09%	83,50%	84,00%	84,50%	85,30%	86,00%	86,00%
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	93%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Persentase Pengelolaan Profile kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran

merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
MISI I : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Meningkatnya kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,50 %
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	100%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM	83,50
		Nilai SAKIP	B
		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	94 %
		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	99 %
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80 %
		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	100 %

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.,2022

2.3. Anggaran Tahun 2022

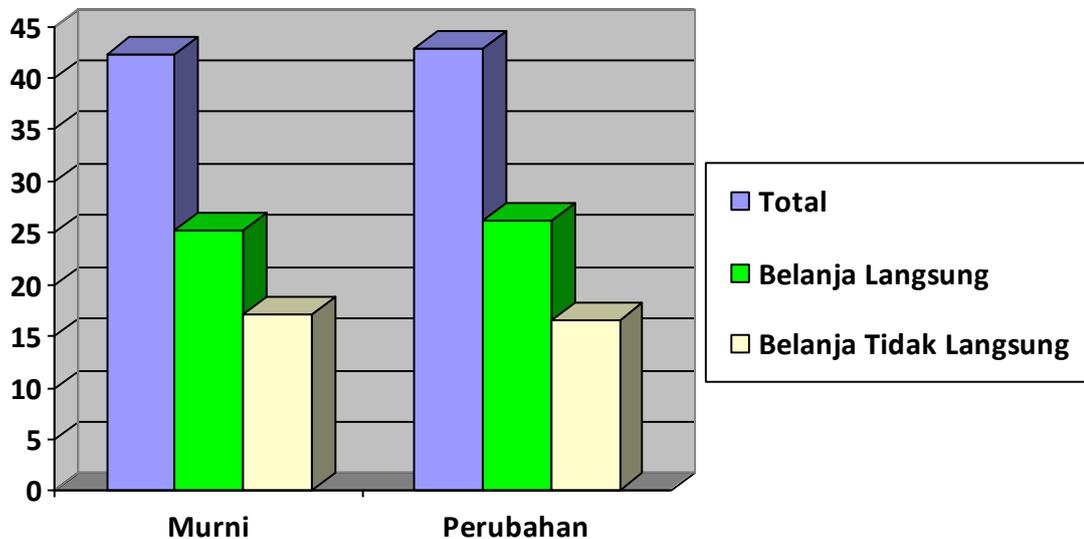
Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp, **42.783.072.921,00** dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. **16.611.389.226,00** dan Belanja Langsung Rp. **26.171.683.695,00**

Tabel 2.3. 1

Pagu Anggaran Dinas Sosial dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	
		Murni	Perubahan
1	Belanja Langsung	25.169.199.485,00	26.171.683.695,00
2	Belanja Tidak Langsung	17.173.683.524,00	16.611.389.226,00
Jumlah Total		42.342.883.009,00	42.783.072.921,00

Gambar 2. 1 Anggaran Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diketahui bahwa Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapatkan penambahan pagu pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. **440.189.999,00**

2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 42.783.072.921,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.428.580.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 26.354.492.674,-.

Tabel 2. 5 Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Murni	Perubahan	Keu	Fisik
1	Belanja Langsung	25.169.199.485,00	26.171.683.695,00	91.29%	99.98 %
2	Belanja Tidak Langsung	17.173.683.524,00	16.611.389.226,00	98.90%	100 %
Jumlah Total		42.342.883.009,00	42.783.072.921,00	94.25%	99.99%

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

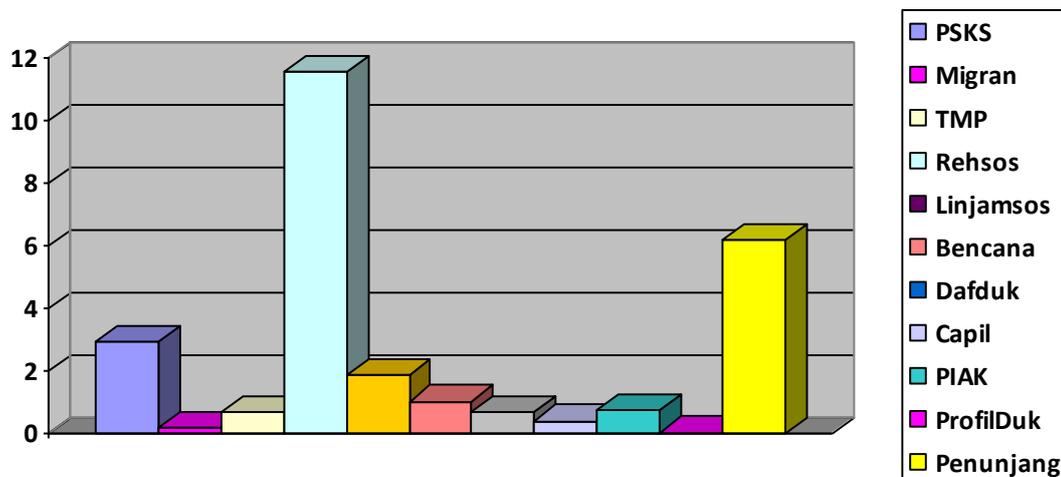
Tabel 2. 6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	11.572.403.441,00	43,91%	Program Rehabilitasi Sosial
		190.000.000,00	0,72%	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		1.019.659.720,00	3,87%	Program Penanganan Bencana
		1.880.786.109,00	7,14%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2.952.085.669,00	11,20%	Program Pemberdayaan Sosial
		659.620.058,00	2,50%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	398.571.856,00	1,51%	Program Pencatatan Sipil
		697.788.778,00	2,65%	Program Pendaftaran Penduduk
		745.630.166,00	2,83%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		28.037.747,00	0,11%	Program Pengelolaan Profil Kependudukan

		6.027.100.151,00	23,56%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jumlah		26.171.683.695,00	100%	

Sumber: Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi, 2022

Gambar 2. 2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi



2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa system informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Orang	277	277	100 %	Sangat Baik
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	Orang	562	562	100 %	Sangat Baik
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	Orang	652	652	100 %	Sangat Baik
			Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	920	920	100 %	Sangat Baik
			Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	Orang	1361	1361	100 %	Sangat Baik
			Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Makam	467	467	100%	Sangat Baik
2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai	83,50 B	86 CC		
		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran	Laporan	37	37	100%	Sangat Baik

Publik yang Prima	penduduk	penduduk					
	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Laporan	22	22	100%	Sangat Baik
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Laporan	33	33	100%	Sangat Baik
	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Laporan	4	4	100%	Sangat Baik

Sumber : Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, 2022

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memiliki 7 (tujuh) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pada Tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai $\geq 100\%$) dari total indikator dengan persentase capaian melampaui dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.

Sasaran ini dicapai melalui Program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- Penerbitan izin pengumpulan sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dala 1(satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan Portensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Orang	277	277	100 %	Sangat Baik
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	Orang	562	562	100 %	Sangat Baik
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	Orang	652	652	100 %	Sangat Baik
			Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	920	920	100 %	Sangat Baik
			Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Orang	1361	1361	100 %	Sangat Baik

			dalam Penyelenggaraan Program Kessos					
			Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Makam	467	467	100%	Sangat Baik

Sasaran Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dengan indikator utama Persentase Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan jumlah target 277 Orang dan realisasi 277 Orang sehingga persentase capaian sebesar 100 %, indikator Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi telah memenuhi sasaran dengan jumlah target 562 dan realisasi 562 sehingga persentase capaian sebesar 100%, indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM jumlah target 652 Orang dan realisasi 652 Orang sehingga persentase capaian sebesar 100 %, indikator Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial jumlah target 920 Orang dan realisasi 920 Orang sehingga persentase capaian sebesar 100%. indikator Jumlah Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos jumlah target 1.361 Orang dan realisasi 1.361 Orang sehingga persentase capaian sebesar 100%, indikator Jumlah Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan jumlah target 467 Makam dan realisasi 467 Makam sehingga persentase capaian sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. 1 Capaian Kinerja Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2021-2022

No.	Indikator Utama	Indikator Capaian	Capaian		Capaian 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	240 Orang	239 Orang	277 Orang	277 Orang	100 %
2.	Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	580 Orang	600 Orang	562 Orang	562 Orang	100 %

SPM	di fasilitasi					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	620 Paket	650 Paket	652 Orang	652 Orang	100 %
	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	125 Orang	45 Orang	920 Orang	920 Orang	100 %
	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	620 Orang	641 Orang	1361 Orang	1361 Orang	100 %
	Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan	1 Lokasi	1 Lokasi	467 Makam	467 Makam	100%

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah sebanyak 240 Orang, di Tahun 2021 terjadi penambahan menjadi 290 Orang, dan di Tahun 2022 Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial menurun menjadi 277 Orang.

Sasaran Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM memiliki indikator sasaran sebagai berikut:

Tahun 2020 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi sebanyak 580 Orang, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 600 orang, dan di Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 562 orang.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM Tahun 2020 sebanyak 620 paket, di Tahun 2021 meningkat menjadi 650 paket, dan Tahun 2022 meningkat menjadi 652 Orang.

Tahun 2020 Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 125 orang, di Tahun 2021 menurun menjadi 45 orang, dan di Tahun 2022 meningkat menjadi 920 orang.

Tahun 2020 peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos sebanyak 620 orang, di Tahun 2021 meningkat menjadi 641 orang, dan di Tahun 2022 meningkat menjadi 1.361 orang.

Tahun 2020 dan 2021 Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan sebanyak 1 Lokasi dan di Tahun 2022 sebanyak 467 Makam.

Sasaran #2: Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator kinerjanya yakni **Nilai IKM Nilai SAKIP, Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk, Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil, Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Persentase Pengeluaran Profil kependudukan.**

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Sosial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan

Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM	Nilai IKM	Nilai	83,50 B	86 CC		
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP					
		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Dokumen/ Laporan	37	37	100%	Sangat Baik
		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Laporan	22	22	100%	Sangat Baik
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dokumen/ Laporan	33	33	100%	Sangat Baik
		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Dokumen	4	4	100%	Sangat Baik

Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Nilai IKM dan Nilai SAKIP dengan target IKM 83,50 dan nilai SAKIP CC untuk realisasi nilai IKM senilai 86 melebihi dari target dan nilai SAKIP mendapat CC dibawah target,

indikator Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk memiliki target 37 Dokumen/Laporan realisasi 37 Dokumen/Laporan sehingga presentase capaian sebesar 100%, Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil memiliki target 22 Laporan realisasi 22 Laporan sehingga presentase capaian sebesar 100%, Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan memiliki target 33 Dokumen/Laporan realisasi 33 Dokumen/Laporan sehingga presentase capaian sebesar 100%, Persentase Pengeluaran Profil kependudukan memiliki target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen sehingga presentase capaian sebesar 100% Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. 1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2021-2022

No.	Indikator Utama	Indikator Capaian	Capaian		Capaian 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai IKM Nilai SAKIP		85 B	83,50 B	86 CC	
2.	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	37 Dokumen/ Laporan	37 Dokumen/ Laporan	100%
3.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%
4.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	33 Dokumen/ Laporan	33 Dokumen/ Laporan	100%
5.	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Pengeluaran Profil kependudukan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 nilai IKM mendapat 85 dan nilai SAKIP mendapat B, di Tahun 2022 untuk nilai IKM mendapat 86 dan nilai SAKIP menurun menjadi CC

Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk di Tahun 2020 dan 2021 mencakupi 11 Kab/Kota, Tahun 2022 pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk sebanyak 37 Dokumen/Laporan.

Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil di Tahun 2020 dan 2021 mencakupi 3 Laporan, Tahun 2022 sebanyak 22 Laporan.

Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020 dan 2021 mencakupi 11 Kab/Kota sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 33 Dokumen/Laporan.

Persentase Pengeluaran Profil kependudukan Tahun 2020 dan 2021 mencakupi 11 Kab/Kota sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 4 Dokumen.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp.23.892.499.687,84 (91,29%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 26.171.683.695,-. Realisasi anggaran untuk program atau kegiatan utama sebesar Rp. 40.320.980.934,84 (94,25%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Dukupil Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.428.580.247,- (98,90%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp. 23.892.400.687,84 (91,29%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Dinas Sosial Dukupil Provinsi Jambi Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Utama	Indikator Capaian	Kinerja			Anggaran		
				Satuan	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	277	277	11.572.403.441	10.451.128.291,00	90,31%
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	Orang	562	562	190.000.000	176.368.500	92,83%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan	Orang	652	652	1.019.659.720	922.625.797	90,48%

			Korban Bencana sesuai SPM						
			Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	920	920	1.880.786.109	1.779.614.891	94,62%
			Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	Orang	1361	1361	2.952.085.669	2.784.379.897	94,32%
			Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Makam	467	467	659.620.058	631.683.312	95,76%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai	83,50 B	86 CC	22.638.489.377	21.971.176.144	97,05%
		Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	memenuhi pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	37	37	697.788.778	581.977.124	83,40%
		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Pencatatan Sipil	Laporan	22	22	398.571.856	337.291.486	84,63%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Laporan	33	33	745.630.166	660.244.792	88,55%
		Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Pengeluaran Profil kependudukan	Laporan	4	4	28.037.747	24.490.700	87,35%
Belanja langsung							26.171.683.695	23.892.400.687,00	91,29%
Belanja tidak langsung							16.611.389.226	16.428.580.247	98,90%
Total Belanja							42.783.072.921	40.320.980.934,00	94,25%

Sumber : Dinas Sosial Dukcapil, 2022

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Analisis efisiensi Dinas Sosial Dukupil Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Utama	Indikator Capaian	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5	6
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	90,31%	9,69
		Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	100%	92,83%	7,17
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	100%	90,48%	9,52
			Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	94,62%	5,38
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	100%	94,32%	5,68
			Persentase Perwujudan Nilai-Nilai Kepahlawanan	100%	95,76%	4,24
		2	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai IKM Nilai SAKIP	Nilai IKM Nilai SAKIP	100%
Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk			100%	83,40%	16,60

	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	100%	84,63%	15,37
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	100%	88,55%	11,45
	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan	100%	87,35%	12,65
Jumlah			100	94,25%	5,75

Sumber : Dinas Sosial Dukupil, 2022

ANALISIS EFISIENSI

Berdasarkan tabel diatas, kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Provinsi Jambi telah memenuhi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,75%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan saranaprasarana.

Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.

BAB 4

Bab 4 berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial Dukcapil pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Dukcapil Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial Dukcapil tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis, terlihat bahwa sasaran perangkat daerah, yaitu:
 - **Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar** dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial mencapai 100 %, indikator Persentase Pemerlu Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM mencapai 100 %.
 - **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima** dengan indikator Nilai IKM dan Nilai SAKIP senilai 86 untuk nilai IKM dan nilai SAKIP mendapatkan CC, indikator Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk mencapai 100 %, indikator Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil mencapai 100 %, indikator Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan mencapai 100 %, indikator Persentase Pengeluaran Profil kependudukan mencapai 100 %.
2. Realisasi kinerja Dinas Sosial Dukcapil telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dengan efisiensi anggaran sebesar 5,75%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, diantaranya sarana dan prasarana serta SDM panti yang belum memadai, dukungan anggaran yang belum sejalan dengan peningkatan target.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial

3. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



Jambi, 30 Maret 2023
Kepala Dinas,

ARIEF MUNANDAR, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670307 199903 1 004